



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
PT MULIA BOGA RAYA TBK  
("Perseroan")**

**MATERIALS OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS ("AGMS") OF  
PT MULIA BOGA RAYA TBK  
("Company")**

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan pada 13 Juli 2020 :**

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

**Penjelasan:**

Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 : [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) atau situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Agenda of the AGMS to be held on 13 July 2020:**

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2019, and to grant a release and discharge from their responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management and supervision actions during the financial year ended December 31, 2019

**Explanation:**

The Board of Directors will present the performance of the Company in 2019 and the BOC will present the implementation of their supervisory duties in 2019, as set out in the 2019 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in f the Articles of Association of the Company and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**").Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2019 : [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) or website Indonesia Stock Exchange : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019;

**Penjelasan:**

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019 adalah sebesar Rp 153.715.309.417. Usulan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019 tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat RUPST

3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana

**Penjelasan:**

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (18) : Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

2. Determination of use of net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019, including the accumulated profit recorded in the fiscal year 2019.

**Explanation:**

Net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019, including the accumulated profit recorded in the fiscal year 2019. amounted to Rp 153,715,309,417. The proposal for the use of net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019, including the accumulated profit recorded in the fiscal year 2019 will be submitted by the Board Directors of the Company at the AGMS

3. Submission of Accountable Report for the use of proceeds from Initial Public Offering

**Explanation:**

Submission of Accountable Report for the use of proceeds from Initial Public Offering to comply with provisions in the Article 6 paragraph (1) the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 on the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering.

4. Determination of salary or honorarium and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2020

**Explanation:**

Accordance to Article 13 paragraph (18) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.

Maka Perseroan akan mengajukan pada RUPST :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

The Company will propose at the AGMS :

1. To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for year 2020.
2. To grant authority to the Board of Commissioners to determine the distribution between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with the proposed item 1 (one) above, subject to the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable rules and regulations.
5. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020.

**Explanation:**

The Company will propose at the AGMS to grant authority to the BOC, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("OJK Regulation") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020").